

**Peran Dinas Koperasi dan UKM Dalam  
Meningkatkan UMKM di Rantau Prapat  
Kabupaten Labuhanbatu**

**Junita Wulandari Dalimunthe<sup>1</sup>, Muhammad Arif<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

[junitadalimunthe21@gmail.com](mailto:junitadalimunthe21@gmail.com) [Mhdarif@gmail.com](mailto:Mhdarif@gmail.com)

**ABSTRACT**

*One of the roles of the Rantau Prapat City Cooperatives and SMEs Service is to empower MSMEs in Rantau Prapat City, which has been stated in the Rantau Prapat City Cooperatives and SMEs Service. the realization of SMEs as an economic force that can improve the welfare of the community. Micro-enterprises in practice can help many people, considering that most Indonesian citizens belong to the lower-middle class category. From economic practice, they are classified as business actors in micro-economics. If the government's policies are in favor of groups of micro- economic actors, then it is possible that the policy will help many members of the community. That is, some Indonesian people will be lifted from poverty as a disease that afflicts the wider community. The purpose of this study is to identify and describe the implementation of SME empowerment as well as the supporting and inhibiting factors. This study uses descriptive research with a qualitative approach. The focus of this research problem is (1) the implementation of SME empowerment (2) supporting factors and inhibiting factors. and inhibitors. The advice given is that the Department of Cooperatives and SMEs in Labuhan Batu City collects data on all SMEs.*

**Keywords ; Role, UMKM, Labuhan Batu, Rantau Prapat, Indonesia**

**ABSTRAK**

Salah satu tugas Dinas Koperasi dan UKM Kota Rantau Prapat adalah melibatkan UMKM di Kota Rantau Prapat yang telah dituangkan dalam Dinas Koperasi dan UKM Kota Rantau Prapat. pengakuan UKM sebagai kekuatan moneter yang dapat bekerja pada bantuan pemerintah daerah setempat. Usaha miniatur secara praktis dapat membantu banyak orang, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia memiliki tempat dengan klasifikasi kelas pekerja bawah. Dari praktik keuangan, mereka disebut sebagai penghibur bisnis dalam masalah keuangan mini. Dengan asumsi strategi otoritas publik cocok untuk pertemuan penghibur keuangan mini,

maka, pada saat itu, dapat dibayangkan bahwa pendekatan tersebut akan membantu banyak orang dari daerah setempat. Artinya, sebagian masyarakat Indonesia akan terangkat dari kemelaratan sebagai penyakit yang meresahkan daerah yang lebih luas. Motivasi yang melatarbelakangi penelitian ini adalah untuk membedakan dan menggambarkan pelaksanaan penguatan UKM serta unsur pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pemeriksaan yang mencerahkan dengan metodologi subjektif. Pokok permasalahan pemeriksaan ini adalah (1) pelaksanaan penguatan UKM (2) variabel pendukung dan faktor penghambat. selanjutnya inhibitor. Saran yang diberikan adalah agar Dinas Koperasi dan UKM Rantau Prapat menghimpun informasi tentang seluruh UKM yang ada di kota tersebut.

**Kata kunci** ; Peran, UMKM, Labuhan Batu, Rantau Prapat, Indonesia

## PENDAHULUAN

Koperasi dan UKM tempat kerja memiliki pekerjaan yang sangat besar dan peran penting bagi perekonomian Indonesia. Di negara-negara non-industri, salah satu kebutuhan mendasar dalam menyelesaikan latihan negaranya adalah pergantian acara publik, seperti halnya negara Indonesia. Hal yang menjadi pertimbangan dalam perbaikan publik adalah bidang keuangan. pemerintah pusat namun di samping pemerintah terdekat. Usaha mikro, kecil dan menengah adalah bagian penting dari kerangka keuangan publik, khususnya mempercepat nilai, melalui membuka pintu bisnis dan pekerjaan, memperluas gaji individu, dan mengambil bagian dalam memperluas perdagangan asing dan memperkuat pekerjaan publik ekonomi nasional (Hubeis 2009).

Dalam hal pengawasan terhadap pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengharuskan DPRD mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan standar kemandirian dan gotong royong. Terlebih lagi, legislatif terdekat dikoordinasikan untuk memiliki opsi untuk mempercepat pengakuan bantuan pemerintah daerah melalui kemajuan, administrasi, penguatan dan dukungan daerah, serta memperluas keseriusan wilayah, dengan menerapkan standar pemerintahan aturan mayoritas, nilai, pemerataan, kehormatan, dan ketegasan suatu daerah, dalam susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara praktis, UMKM dapat membantu banyak orang, mengingat

sebagian besar penduduk Indonesia memiliki tempat dengan kelas menengah ke bawah. Dalam perilaku keuangan mereka, mereka adalah penghibur bisnis yang didelegasikan dalam ekonomi mikro. Jika strategi otoritas publik mendukung kelompok perilaku ekonomi mikro, dapat dibayangkan bahwa pengaturan tersebut akan banyak membantu daerah setempat. Selain itu, pemerintah daerah terdekat dikoordinasikan untuk dapat mempercepat penerimaan bantuan pemerintah daerah melalui kemajuan, administrasi, penguatan, dan tugas daerah, serta perluasan keseriusan provinsi, dengan mempertimbangkan standar mayoritas. sistem aturan, nilai, pemerataan, kehormatan, dan ketegasan suatu daerah.

Di Indonesia, jumlah UMKM menguasai lebih dari organisasi besar, mengingat jumlah UMKM lebih besar dari cakupan usaha. Dinas Koperasi dan UKM memegang peranan yang sangat terkait dalam mengembangkan lebih lanjut harapan masyarakat dan UMKM akan kenyamanan sehari-hari mengingat dengan adanya Dinas Koperasi dan UKM banyak kalangan pekerja ke bawah yang memiliki pilihan untuk memulai usaha melalui pengaturan modal yang diberikan. Mengingat banyaknya pengangguran dan tidak setiap orang memiliki landasan instruktif yang tinggi untuk mencari lapangan pekerjaan baru, kehadiran UKM di Rantau Prapat memberikan pintu terbuka yang luar biasa untuk bekerja bagi individu yang tidak memiliki pendidikan tinggi atau kecil dan menengah. Jaringan yang besar dan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu mata air Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini, semua kantor pemberi global mendukung UKM. Beberapa menganggapnya sebagai kendaraan untuk menetapkan pintu terbuka kerja (ILO), yang lain menganggapnya sebagai penjabaran tanggung jawab mereka (IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia) untuk memerangi kebutuhan di negara-negara agraris, misalnya, di negara-negara Asia.

Sampai saat ini, koperasi masih sangat diminati terlepas dari munculnya lembaga keuangan mikro seperti usaha, bank provinsi, dan sebagainya. Seperti yang diketahui orang, organisasi ini menawarkan jenis bantuan yang sangat mudah digunakan dan diakses dalam waktu singkat dan waktu penanganan yang sederhana. Dengan demikian, tugas koperasi seperti yang mungkin kita ketahui, sumber kekayaan yang bermanfaat berasal dari kegiatan pertukaran yang dilakukan oleh individu-individunya dan gerakan apa pun yang dilakukan oleh kelompok itu sendiri, salah satu contoh dari kegiatan usaha kecil menengah (UMKM). Dari manfaat dalam memberikan aset kepada UMKM ini, koperasi bagaimanapun juga dapat memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan setiap kegiatannya. Melihat persoalan-persoalan yang dilirik oleh UKM, maka peran pemerintah daerah sekitar khususnya Dinas Koperasi dan UKM Rantau Prapat yang berkewajiban untuk turut serta menanggulangi permasalahan tersebut melalui tugas Dinas Koperasi dan UKM dalam mengembangkan UMKM lebih lanjut. Penghibur keuangan lainnya. Dinas Koperasi dan UKM Kota Rantau Prapat memiliki program pembinaan UKM yang salah satunya telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

## TINJAUAN PUSTAKA

Makna Peran Menurut Soekanto (1990, hlm.39), pekerjaan adalah bagian yang kuat dari situasi individu dan mengingat posisi itu orang tersebut memainkan suatu aktivitas atau gerakan perubahan dinamis di mana pekerjaan itu diandalkan untuk membuat keadaan atau hasil yang ideal. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan kekuasaan, kekuasaan dan jabatan yang diklaim sesuai dengan kedudukannya dengan tujuan agar ada penyesuaian jenis kegiatan. Sebagaimana ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Perekonomian Pokok, koperasi dicirikan sebagai perkumpulan moneter orang perseorangan dengan suatu badan sosial, yang terdiri dari orang-orang atau unsur-unsur. Peraturan. Bermanfaat yang merupakan rencana keuangan sebagai

upaya bersama mengingat standar koneksi dan kerjasama bersama. Alasan koperasi adalah untuk memajukan bantuan pemerintah dari individu dan daerah dan untuk ikut membangun permintaan moneter publik untuk membuat masyarakat tingkat tinggi, adil dan makmur. Jika hal ini dapat dilakukan, koperasi menjadi bagian yang sangat diperlukan dalam perekonomian Indonesia.

An-Nabhani (2000, hlm. 187) dengan lantang mengungkapkan apa pun yang dibutuhkan struktur, koperasi adalah struktur industrialis non-syar'i. Ia tidak setuju bahwa koperasi bisa disebut/dikoordinasikan dengan syirkah dalam Islam. Karena koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi wirausaha. Penjelasan adalah, karena koperasi masih merupakan suatu bentuk organisasi, modal sebagai spekulasi antara pemahaman yang berkumpul di antara mereka sendiri, untuk berpartisipasi sesuai dengan keadaan khusus mereka. Dalam pandangan Islam sendiri, koperasi menjaga standar kerukunan dan hubungan sehingga dipandang sebagai jenis syirkah ta'awuniyah yang berarti bekerja sama dan tolong-menolong dalam kebaikan, dan dalam tugasnya tidak ada kaitannya dengan riba, maysir (taruhan) dan latihan gharar (teori). kemudian, pada saat itu, sangat membantu dengan kualitas Islam. (MES 2011. 36).

Area usaha swasta merupakan area yang signifikan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Sangat baik terlihat dari komitmennya terhadap PDB publik yang telah mencapai 56,5%. Manfaat dari kawasan usaha swasta (UMKM) sebagai daerah homegrown yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat adalah karena ketergantungan yang kuat pada bahagia di dekatnya. Sabirin (2003, hlm. 485) berpendapat bahwa kekuatan usaha mandiri (UMKM) pada masa darurat dibuat mengingat perusahaan swasta tidak terlalu bergantung pada variabel luar, misalnya kewajiban dalam perdagangan asing dan impor. bahan alami dalam melakukan latihannya. Melihat kecilnya potensi usaha kecil menengah (UKM), salah satu sistem untuk membangun kembali perekonomian masyarakat adalah yang dilakukan otoritas publik dengan melibatkan UKM.

Seperti halnya Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) merupakan kelompok usaha keuangan yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Pasalnya, usaha kecil menengah dan koperasi merupakan bidang usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan penyerapan tenaga kerja yang besar. Oleh karena itu, masih ada jurang gaji yang sangat besar antara visioner bisnis besar dan usaha kecil, menengah dan bermanfaat (UKMK), kemajuan keseriusan UKMK, secara langsung merupakan kerja untuk menggarap bantuan pemerintah dari individu pada umumnya, seperti serta memperketat lubang keuangan. Dalam tugas koperasi memberikan bantuan pemerintah, misalnya, komitmen mereka untuk membuka pintu usaha. Hal ini tentunya juga dapat memudahkan beban otoritas publik dan swasta dalam mengelola tenaga kerja yang jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun. masih menjadi bagian terbesar dari publik Indonesia. Untuk mengirimkan latihan yang menyenangkan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah metode untuk menangani suatu masalah yang terjadi untuk memutuskan jawaban, menemukan, membuat atau menguji realitas informasi dengan mengumpulkan, menyusun, dan mengartikan kata-kata dengan cara yang sama dengan aturan dan keputusan yang berlaku dalam penulisan buku harian.

Pendekatan pemeriksaan sangat penting signifikan dan konklusif dalam penelitian mengingat fakta bahwa sifat hasil eksplorasi sangat penting tidak sepenuhnya diselesaikan oleh pengaturan pemeriksaan yang digunakan. Teknik metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi yuridis observasional. Strategi yuridis observasional adalah teknik yang digunakan untuk mengatasi masalah dalam penelitian dengan menganalisis informasi opsional dan setelah itu akan dilanjutkan oleh Penelitian informasi penting yang ditemukan di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **• Pertumbuhan Iklim Usaha**

Mengingat konsekwensinya rapat cenderung dibubarkan seperti yang ditunjukkan oleh undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 ayat 9 Lingkungan usaha adalah suatu keadaan yang diupayakan untuk Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sedang secara sinergis melalui pembatasan berbagai peraturan dan pedoman dan strategi di berbagai bagian kehidupan moneter sehingga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memperoleh kecenderungan, keyakinan, peluang, keamanan, dan dukungan bisnis yang paling banyak.

Seperti yang diungkapkan oleh staf Labuhan Batu, bahwa keadaan dunia usaha di Labuhan Batu dalam mendukung kekokohan lingkungan bisnis, banyak yang mengalami kejatuhan omset sehingga kondisinya tidak stabil karena jumlahnya yang banyak kehilangan klien seperti awal bisnis mereka. Namun, banyak area bisnis juga membuat organisasi sampingan untuk membantu keandalan lingkungan usaha saat ini. Untuk sementara, bagi UKM sendiri, dalam menghadapi persaingan di Kota Labuhan Batu selesai dengan banyak hal, seperti membuat item mereka dengan berbagai kemajuan, mengerjakan sifat setiap item untuk memasarkan barang-barang mereka ke pusat komersial dan media berbasis web lainnya.

### **• Pertumbuhan Unit Usaha Baru**

Berdasarkan hipotesis penguatan, Dinas Koperasi dan UKM Kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu lakukan berbagai cara mengundang organisasi baru untuk penghibur UMKM yang sudah mulai terjun ke dunia usaha. Ekspansi dalam pengembangan UMKM pasti akan terjadi apalagi yang sangat kritis, hal ini dibuktikan dengan berkembangnya sekitar 1.581 UMKM hanya dalam

rentang tahun 2016-2019 ini menunjukkan bahwa ada pergantian peristiwa yang sangat besar positif dengan persiapan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Rantau Prapat digelar. Terhubung dengan entri sederhana ke aset yang berguna, khususnya modal usaha bagi pelaku usaha UMKM baru dan lama, prasyaratnya adalah: sangat sederhana dan tidak berbelit-belit. Ini adalah jenis penguatan dari Kantor Koperasi dan UKM di Kota Rantau Prapat meski dengan pengembangan unit liar pengejaran baru.

- **Pengembangan Usaha**

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memungkinkan pelaku UMKM sejauh memberikan pengajaran, persiapan bisnis, persiapan pemasaran internet, serta persiapan administrasi moneter. Hal ini dilakukan sedemikian rupa sehingga sifat asset Manusia pelaku bisnis yang merupakan pelaku bisnis UMKM telah berkembang dalam menangani bisnisnya. Seperti yang diungkapkan oleh Pearson dalam Prasetyo (2015). Penguatan ide menekankan bahwa individu memperoleh kemampuan, informasi, dan kekuatan yang cukup untuk memengaruhi rutinitas sehari-harinya dan pengalaman orang lain yang menjadi pertimbangannya. Karena banyak pelaku bisnis UMKM yang ambil bagian dalam persiapannya yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu yang berharga meningkatkan informasi dan kemampuan SDM dalam menciptakan usaha mereka.

- **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Dalam penguatan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu harus erat kaitannya dengan variabel pendukung dan penekan, baik dari bantuan maupun dari usaha penghibur umkmnya. Adapun variabel pendukung dari Dinas Koperasi misalnya bantuan modal untuk UKM pelaku bisnis sehingga organisasinya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kedua memudahkan pelaku bisnis UMKM untuk mendapatkan pemikiran baru untuk bisnis mereka. Dari pengenalan informasi yang saya gambarkan sebelumnya, penguatan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM di kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu sudah sesuai dengan realita yang ada.

- **Faktor Pendukung Dan Penghambat**

Dalam penguatan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota, Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu harus erat kaitannya dengan variabel pendukung dan penekan, baik dari bantuan maupun dari usaha penghibur umkmnya. Adapun variabel pendukung dari Dinas Koperasi misalnya bantuan modal untuk Pelaku bisnis UKM dengan tujuan agar organisasinya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kedua mempermudah para pelaku bisnis UMKM untuk mendapatkan ide-ide inovatif untuk bisnis mereka. Dari pengenalan informasi yang saya gambarkan sebelumnya, penguatan

yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM di kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu sudah sesuai dengan realita yang ada. Dalam sistem penguatan, tidak selalu benar untuk dibentuk. ada begitu banyak elemen yang menggagalkan pencapaian sebuah penguatan, untuk lebih spesifik utamanya dibutuhkan SDM yang hebat untuk menilai pelakunya organisasi yang tidak mematuhi pedoman dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu dan untuk kelancaran usaha bagi UKM itu sendiri. Yang kedua adalah untuk penghibur bisnis umkm adalah kesulitan memajukan barang-barang mereka di pasar jadi semua Pelaku bisnis UMKM belum menjalankan apa yang didapat dari tahap persiapan yang diinstruksikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, cenderung sangat baik dapat dianggap bahwa Dinas Koperasi memainkan perannya dalam penguatan UMKM sangat baik. Akhir tergantung hasil penelitian yang menyinggung tiga ciri kerja Dinkop dalam menggaet UMKM khususnya pengembangan lingkungan bisnis, pengembangan unit khusus baru dan kemajuan bisnis. Dari Pembicaraan hasil pemeriksaan hanya menunjukkan bahwa tugas Dinkop dalam penyelesaian Pengembangan lingkungan bisnis menjadi penunjuk utama yang belum berjalan sesuai harapan Bagus. Komponen pendukung dalam mengikutsertakan UMKM di kota Surabaya adalah permodalan dari Dinkop kepada pelaku bisnis UMKM dan memberikan berbagai tahapan persiapan kepada UMKM sehingga barang-barang mereka berkreasi. Bagaimanapun, untuk penghibur bisnis

UMKM masih dianggap sebagai variabel penghambat dalam mengembangkan produk mereka karena: sebagai aturan umum mereka kadang-kadang tidak membuat perbedaan informasi yang diinstruksikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah di Rantau Prapat. Ide yang bisa diberikan adalah untuk lebih mengembangkan eksekusi dalam mendukung pekerjaan Dinkop dalam melibatkan UMKM, mantap dalam tugas pengembangan usaha baru apa lagi peningkatan bisnis serta melacak pengaturan dengan perkembangan untuk menyeimbangkan lingkungan bisnis bersahabat dengan UMKM. Menurut variabel penghambat, Kantor Koperasi seharusnya juga UMKM yang ada di Kota Rantau Prapat memberikan penilaian seperti apa pelaku usaha UMKM itu mereka telah menerapkan semua yang diinstruksikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Kecil dan Menengah Rantau Prapat dalam mengawasi dan membina usahanya.

**DAFTAR PUSTAKA**

An-Nabhani, Taqiyuddin, Sistem Moneter Islam Jakarta: Gema Insani Press, dan Tazkia Cendekia, 2000

Diva, G. (2009). Menciptakan UKM melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Jakarta: Sekolah Tinggi Manajemen Bakrie.

Hubei. Musa. 2009. Peluang Usaha Kecil di Inkubator Bisnis, Ghalia Indonesia, Jakarta

Hafsa, M.Jafar. (2004) Upaya Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM). Diakses pada tanggal 3 April 2013 pukul 22:15 WIB dari [www.smeccda.com](http://www.smeccda.com)

Nirwana, C. D., Muhammadiyah, dan Hasanuddin, M. (2017). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Enrekang. *Kerjasama: Jurnal Administrasi Publik*.

Sunariani, N.N., Suryadinatha, A.O., dan Mahaputra, I.I. (2017). Penguatan 126 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Program Pembangunan di Provinsi Bali. *Jurnal Logika Manajemen dan Bisnis*.

Wardani, H. (2013). Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Malang (Studi Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(2), 213-220.